

# Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea in Efforts to Realize EV Battery Project Investment

## *Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Korea Selatan dalam Upaya Realisasi Investasi Proyek Baterai EV*

Aulia Nadhif & Dadan Suryadipura

Universitas Padjadjaran

### ABSTRACT

The EV battery project in Indonesia is one of Indonesia's nickel downstream policy agendas. This policy aims to be able to increase the value of nickel commodities and create Indonesia's ability to be able to engage in the downstream industry. To realize the EV battery project, the Indonesian government is cooperating with South Korea in developing the EV battery industry in Indonesia. This article focuses on the commercial diplomacy efforts of the Indonesian government to obtain investment for developing the EV battery industry in Indonesia through investment promotion. This article uses qualitative research methods. After conducting an analysis, this article shows that the Indonesian government is carrying out commercial diplomacy activities by using IIPC Seoul as an extension of the Ministry of Investment/BKPM which acts as a facilitator and clearing agent to facilitate investment from South Korea and Indonesia. This effort is assisted by other government agencies such as the Ministry of BUMN, Ministry of Energy and Mineral Resources, and others to achieve a large investment score for the development of the EV industry in Indonesia. This article concludes that the commercial diplomacy carried out by the Indonesian government succeeded in achieving the goal of obtaining investment for the EV battery project to be able to increase the value of nickel commodities and create a downstream industry.

**Keywords:** Commercial Diplomacy, Nickel Downstream, Indonesia, Investment Promotion, EV Battery

Proyek baterai EV di Indonesia merupakan salah satu agenda dalam kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan nilai komoditas nikel dan menciptakan kemampuan Indonesia untuk dapat bergerak dalam industri hilirisasi. Untuk dapat merealisasikan proyek baterai EV, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama investasi terhadap Korea Selatan untuk dapat mengembangkan industri baterai EV di Indonesia melalui promosi investasi. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Setelah melakukan analisis, artikel ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan aktivitas diplomasi komersial dengan menggunakan IIPC Seoul sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Investasi/BKPM yang bertindak sebagai fasilitator serta clearing agent untuk dapat memudahkan lajur investasi dari Korea Selatan dan Indonesia. Usaha ini dibantu dengan perangkat pemerintah lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan lainnya sehingga dapat mencapai torehan investasi yang besar untuk pengembangan industri EV di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa diplomasi komersial yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil mencapai tujuan yaitu mendapatkan investasi untuk proyek baterai EV untuk meningkatkan nilai komoditas nikel dan menciptakan industri hilirisasi.

**Kata-kata kunci:** Diplomasi Komersial, Hilirisasi Nikel, Indonesia, Promosi Investasi, Proyek Baterai EV

*Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea  
in Efforts to Realize EV Battery Project Investment*

Sebagai negara berkembang, Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo membawa visi untuk dapat membangun perekonomian Indonesia tahun 2045. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Indonesia akan lebih meningkatkan nilai investasi dengan mengembangkan industri di Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah mempersiapkan situasi ekonomi melalui kebijakan ekonomi 2021 dalam rancangan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Beberapa hal yang menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo salah satunya adalah dengan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing ekonomi serta mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital.

Merujuk kepada hal ini, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan hilirisasi<sup>1</sup> nikel sebagai salah satu upaya untuk dapat mengembangkan industri dan meningkatkan nilai komoditas nikel. Kebijakan hilirisasi berkembang pada masa pemerintahan Joko Widodo hingga akhirnya Indonesia memberlakukan larangan ekspor nikel mentah pada 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepemilikan serta produksi nikel terbesar di dunia. Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton nikel (Kementerian ESDM 2020). Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan produksi pertambangan nikel terbesar di dunia bersama dengan Filipina, Rusia, Australia, dan Kanada (Nickel Institute 2022). Sebagai salah satu negara dengan produksi pertambangan nikel terbesar di dunia, industri nikel di Indonesia didukung dengan adanya 296 total industri pertambangan yang aktif dengan rincian 293 industri aktif yang melakukan produksi pertambangan dan tiga perusahaan yang sedang dalam tahapan eksplorasi selama tahun 2020 (Kementerian ESDM 2020).

---

<sup>1</sup> Hilirisasi merupakan sebuah proses pengembangan industri dari hulu ke hilir dengan mengembangkan industri dari produksi bahan mentah hingga barang setengah jadi atau barang jadi

Urgensi pemerintah Indonesia dalam memberlakukan kebijakan hilirisasi nikel adalah untuk dapat meningkatkan nilai komoditas nikel. Sebelum adanya larangan ekspor nikel melalui kebijakan hilirisasi, industri nikel di Indonesia cenderung melakukan ekspor nikel mentah. Aktivitas ekspor nikel mentah yang dilakukan oleh industri nikel di Indonesia tidak dapat memanfaatkan potensi dari nikel itu sendiri. Nikel merupakan hasil tambang yang dapat diolah menjadi berbagai macam hal termasuk baja tahan karat, dan baterai EV. Keuntungan yang didapatkan apabila nikel dapat diolah menjadi feronikel dapat mencapai 10 kali lipat dan bahkan dapat mencapai 19 kali lipat apabila feronikel dapat diolah menjadi baja tahan karat (Idris 2019).

Salah satu proyek dalam pengembangan industri nikel melalui hilirisasi adalah dengan membangun industri baterai Electric Vehicle<sup>2</sup> (EV). Pengembangan industri baterai EV menjadi salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan nilai investasi melalui aktivitas diplomasi komersial. Salah satu aktivitas diplomasi komersial yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan promosi investasi untuk mendapatkan Foreign Direct Investment (FDI) untuk dapat membangun bisnis nasional (Okano-Heijmans 2011).

Untuk dapat merealisasikan pembangunan industri baterai EV di Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan Korea Selatan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2021 dengan perusahaan asal Korea Selatan yaitu Hyundai dan LG Energy Solution. Kerja sama ini menghasilkan torehan investasi yang fantastis dengan nilai mencapai Rp 142 triliun untuk dapat membangun industri baterai EV di Indonesia (Danajaya 2022). Diplomasi komersial menjadi suatu hal yang penting karena dapat digunakan untuk dapat mencapai tujuan ekonomi dan meningkatkan bisnis nasional.

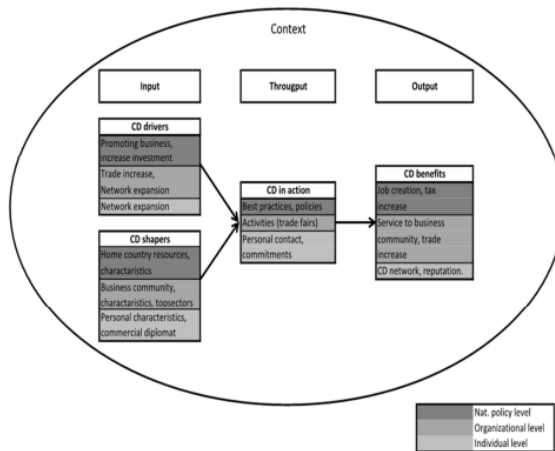
Pada prinsipnya, diplomasi komersial dijelaskan sebagai aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan bisnis nasional mereka. Secara lebih rinci, Reuvers (2012) mengemukakan bahwa untuk dapat menjelaskan aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan oleh suatu negara, dapat dilakukan dengan melihat tiga aspek utama dalam diplomasi

<sup>2</sup> Electric Vehicle atau EV merujuk kepada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

*Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea  
in Efforts to Realize EV Battery Project Investment*

komersial yaitu *input*, *throughput*, dan *output*. Ketiga aspek ini merujuk kepada kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Reuvers untuk dapat menjelaskan mengenai aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan oleh suatu negara. Reuvers menjelaskan bahwa *input* merupakan proses awal yang terbagi menjadi dua bagian yaitu *drivers* dan *shapers*. *Drivers* merupakan tujuan dan rasionalitas suatu negara dalam melakukan diplomasi komersial dan *shapers* merupakan faktor-faktor yang mendorong tujuan serta realitas tersebut. *Throughput* dijabarkan sebagai aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan oleh negara tersebut, meliputi hal-hal seperti keikutsertaan negara dalam pameran dagang atau aktivitas ekspor dan interaksi yang terjadi antara *home* dan *host country*, sedangkan *output* merupakan hasil akhir yang didapatkan setelah melakukan diplomasi komersial.

**Gambar 1**  
Kerangka Teoritis Diplomasi Komersial



*Sumber: Reuvers (2012, 13)*

Beberapa hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa diplomasi komersial yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis nasional. Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan komoditas coklat Lampung melalui bisnis nasional melakukan diplomasi komersial terhadap Uni Eropa yang menghasilkan peningkatan angka ekspor coklat Lampung di Uni Eropa dan mengembangkan bisnis nasional dengan komoditas

coklat lampung ke taraf internasional (Inayah et al. 2022, 65). Dalam kasus pemerintahan Arab Saudi, diplomasi komersial memberikan dampak yang signifikan terhadap internasionalisasi bisnis nasional. Meskipun terdapat permasalahan bahwa rata-rata bisnis dalam negeri tidak mengetahui secara pasti pengertian diplomasi komersial, namun keberhasilan diplomasi komersial dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antara pemerintah dan juga bisnis dalam negeri (Aleidan 2019, 1019). Aplikasi diplomasi komersial oleh Serbia terhadap Tiongkok meningkatkan ekonomi negara. Peningkatan ekonomi negara ini berdasarkan adanya peningkatan FDI setelah melakukan diplomasi komersial karena Serbia bertujuan untuk meningkatkan FDI sedangkan Tiongkok sedang gencar untuk melakukan penanaman modal kepada negara-negara berkembang (Bellina 2019, 53) Andrew Charlton (2007) dan Sung-Hoon Lim (2007) dalam penelitiannya memperlihatkan hasil yang signifikan dengan adanya promosi investasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peningkatan FDI yang memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa promosi investasi dapat meningkatkan FDI secara signifikan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan bisnis dan ekonomi nasional.

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan hingga artikel ini ditulis, tidak ada artikel yang secara spesifik menjelaskan mengenai diplomasi komersial Indonesia terhadap Korea Selatan dalam upaya mendapatkan investasi untuk pengembangan proyek baterai EV di Indonesia. Artikel ini membahas mengenai usaha diplomasi komersial yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Korea Selatan dalam upaya untuk mendapatkan investasi pengembangan proyek baterai EV di Indonesia. Peran pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi komersial dibahas dengan menjabarkan tujuan, faktor pendorong untuk melakukan diplomasi komersial, aktivitas diplomasi komersial, dan hasil yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia.

### **Faktor Pembentuk Tujuan Diplomasi Komersial Indonesia**

Kepemilikan sumber daya nikel menjadi salah satu faktor pembentuk tujuan yang mendorong Indonesia dalam melakukan aktivitas diplomasi komersial. Hal ini disebabkan sumber daya nikel menjadi salah satu alasan utama pemberlakuan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia yang memuat perencanaan pengembangan industri baterai EV di Indonesia. Topik mengenai hilirisasi diangkat menjadi topik penting dalam RPJM 2020-2024, bahwa salah satu strategi untuk mencapai visi 2045 adalah dengan membentuk hilirisasi industri yang menopang transformasi ekonomi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Joko Widodo bahwa kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia dilakukan untuk dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah nikel dengan total produksi nikel terbesar di dunia. Kendati demikian, industri nikel Indonesia cenderung melakukan ekspor berbentuk *raw material* atau barang mentah. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia sehingga diperlukan hilirisasi industri yang akan menciptakan kemampuan bagi Indonesia untuk melakukan proses produksi dari hulu hingga hilir untuk dapat mengurangi defisit neraca perdagangan dan meningkatkan nilai komoditas nikel.

Potensi pertambangan nikel di Indonesia dengan melimpahnya sumber daya alam nikel di Indonesia dan pengolahan yang aktif, terbantu dengan banyaknya lahan pertambangan yang masih belum memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). *Green field* atau lahan pertambangan yang masih belum dilakukan proses produksi pertambangan, tersebar di wilayah Indonesia. wilayah seperti Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara merupakan wilayah potensi pertambangan nikel dengan 77% wilayah masih belum memiliki WIUP dengan total cadangan nikel sebesar 2,6 miliar ton bijih nikel. Selanjutnya, terdapat 43% wilayah potensi pertambangan di Maluku dan Maluku Utara yang masih belum ada WIUP dengan total cadangan bijih nikel sebesar 1,4 miliar ton bijih nikel. Sedangkan di wilayah Papua terdapat 98% *green field* yang masih belum ada WIUP dengan total cadangan nikel sebesar

0,06 miliar ton bijih nikel dan belum memiliki kawasan industri (Kementerian ESDM 2020).

Dengan potensi nikel yang dimiliki pemerintah Indonesia akan mendorong tujuan pemerintah Indonesia untuk melakukan aktivitas diplomasi komersial Indonesia dengan melakukan promosi investasi untuk pengembangan proyek baterai EV. Bagi pemerintah Indonesia meningkatkan nilai nikel dan mampu untuk melakukan ekspor nikel dalam bentuk barang jadi adalah tujuan utama dalam kebijakan hilirisasi nikel. selain itu, dengan banyaknya ketersediaan nikel di Indonesia akan lebih menarik minat investor untuk dapat melakukan penanaman modal dalam proyek baterai EV dan memudahkan pemerintah Indonesia untuk menggaet calon investor yang potensial dengan kepemilikan sumber daya yang melimpah.

Adanya sumber daya nikel yang melimpah yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia menyebabkan pemerintah mengaplikasikan kebijakan percepatan industri kendaraan listrik berbasis baterai nasional dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya nikel dan memberikan kejelasan terhadap industri kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk dapat merealisasikan Net Zero Emission<sup>3</sup> (NZE) pada tahun 2060 atau dapat direalisasikan lebih cepat. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk dapat merealisasikan NZE adalah dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, dan penggunaan EV di sektor transportasi (Pribadi 2020). Untuk dapat menggapai NZE dalam jangka waktu yang lebih cepat, pemerintah Indonesia memproyeksikan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Proyeksi industri KBLBB Nasional ini juga didorong dengan kepemilikan sumber daya nikel yang melimpah di Indonesia, bersamaan dengan adanya kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Selain untuk mengurangi emisi karbon untuk dapat menggapai NZE, industri KBLBB ini sangat menguntungkan terutama dengan pasar Asia Tenggara yang merupakan pasar strategis untuk EV. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang rata-

---

<sup>3</sup> NZE atau Net Zero Emissions merupakan kondisi ketika jumlah emisi karbon yang dilepas menuju atmosfer tidak melampaui jumlah emisi yang mampu diserap bumi.

*Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea  
in Efforts to Realize EV Battery Project Investment*

rata diisi dengan negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina yang memiliki populasi umur produktif yang tinggi. Presiden Asian Federation of Electric Vehicle Association, Edmund Araga, berpendapat bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan potensi yang besar dengan populasi penduduk berusia 23-35 tahun yang tinggi, sehingga terdapat kapasitas untuk melakukan inisiasi perubahan dan kebutuhan atas mobilitas yang tinggi (Media Indonesia 2021).

Pemerintah mendorong perkembangan industri EV di Indonesia melalui kebijakan percepatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Proyek KBLBB Nasional ini merupakan sebuah peluang investasi yang besar terutama dengan konsep strategi industri KBLBB yang tidak hanya berfokus pada produksi EV saja, namun juga memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia sehingga menciptakan satu rantai pasokan hulu ke hilir. Selanjutnya, dengan menghidupkan industri EV ini juga membawa ekosistem bisnis yang lebih berwarna di Indonesia. Dengan adanya industri EV yang aktif maka akan semakin banyak produsen otomotif terutama untuk kendaraan listrik yang akan menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi bagi kendaraan listrik yang nantinya akan dijual di pasar Asia Tenggara. Berdasarkan data yang didapatkan melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, pemerintah Indonesia memiliki target untuk dapat memproduksi setidaknya 600 ribu unit mobil listrik dan 2,45 juta unit motor listrik pada tahun 2030 untuk menunjang industri KLBBS Nasional (Kementerian Perindustrian 2015).

Dalam memberlakukan kebijakan percepatan industri KBLBB Nasional, pemerintah Indonesia melihat adanya peluang prospek bisnis yang besar di Asia Tenggara. Hal ini dapat didukung dengan beberapa poin mengenai mengapa industri EV di Asia Tenggara merupakan prospek bisnis yang menjanjikan terutama bagi Indonesia yang memiliki sumber daya alam nikel yang melimpah.

ASEAN memiliki prospek bisnis yang tinggi pada industri EV, hal ini ditandai dengan pasar kendaraan listrik ASEAN yang mencapai total nilai sebesar 498,93 juta Dolar AS pada tahun 2021 dan akan



diproyeksikan naik mencapai 2.665,3 juta Dolar AS pada tahun 2027 yang tercatat dengan adanya CAGR<sup>4</sup> sebesar 32,73% selama perkiraan periode 2022-2027 (Mordor Intelligence 2022). Selain peningkatan proyeksi pasar EV yang signifikan di ASEAN, pasar EV di ASEAN juga merupakan pasar yang kompetitif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan otomotif yang terjun dalam industri EV di ASEAN.

Pada tahun 2018, Grab dan SP Group menjalin kemitraan strategis untuk menambah 200 EV *fast charging* baru dengan memanfaatkan jaringan *fast charging* milik SP Group. Lalu pada tahun 2020, pemerintah Thailand menggunakan *roadmap* untuk mempromosikan EV melalui berbagai lembaga negara dengan target capaian produksi 250 ribu EV, di antaranya adalah 3.000 bus listrik dan 53.000 motor listrik di tahun 2025. Pada tahun 2021, Asian Development Bank Energy Absolute menandatangani pinjaman hijau sebesar 48 juta Dolar AS untuk membiayai infrastruktur EV di Thailand. Selanjutnya pada Maret 2022, Hyundai meluncurkan pabrik otomotif baru di Indonesia yang akan memproduksi EV rakitan lokal pertama sebagai salah satu inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan rantai pasokan EV di Indonesia (Fallin et al. 2022).

Dengan prospek industri EV yang sangat besar, banyak negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah melakukan inisiasi dalam usaha untuk membangun industri EV. Perusahaan asal Vietnam, Vinfast telah memulai pembangunan fasilitas untuk membangun baterai EV pada tahun 2021 untuk dapat memproduksi 100 ribu baterai EV setiap tahun untuk dijual dan digunakan di kendaraannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk memperluas kapasitas Vietnam sebagai negara manufaktur dan meningkatkan reputasi Vinfast sebagai target investasi yang menarik. Sementara itu, Hong Seng Consolidated Berhad dan EoCell dari Malaysia telah menandatangani MoU pada Juni 2022 untuk mengembangkan pusat manufaktur baterai EV regional di Malaysia. Pasar EV ASEAN yang kompetitif serta proyeksi keuntungan yang terus mengalami peningkatan mendorong

<sup>4</sup> CAGR atau Compound Annual Growth Rate merupakan tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu. CAGR digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan investasi, pendapatan, laba perusahaan dan sebagainya dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda dalam kurun periode waktu tertentu..

pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan tujuan diplomasi komersial yang dilakukan (Fallin et al. 2022).

### **Tujuan Diplomasi Komersial Indonesia**

Indonesia sebagai negara dengan kepemilikan sumber daya nikel yang melimpah, lebih cenderung melakukan ekspor bijih nikel tanpa melalui adanya proses pemurnian sebelumnya. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi Indonesia, karena hasil penjualan bijih nikel dan produk olahan turunan bijih nikel memiliki perbandingan harga yang sangat signifikan.

Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui sektor pertambangan minerba mencapai Rp 40 triliun per tahun, namun apabila kebijakan hilirisasi dapat berkembang dan mampu membangun industri hilirisasi maka penerimaan negara dapat melesat hingga mencapai Rp 1000 triliun per tahun. Feronikel sebagai salah satu hasil olahan nikel mentah setelah melalui proses pemurnian memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan nikel mentah. Harga jual feronikel PT ANTAM mencapai 18,519 Dolar AS/ton atau setara dengan Rp 256.000/ton. Sedangkan harga jual nikel mentah PT ANTAM sebesar 45 Dolar AS/wmt atau setara dengan Rp 644.000/wmt. Apabila dilakukan perhitungan dengan melakukan perkalian harga rata-rata nikel dengan volume penjualan nikel, maka penjualan feronikel memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nikel mentah. Oleh karena itu, penjualan feronikel jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan penjualan nikel mentah. Penjualan feronikel dapat mencapai 223,5 juta Dolar AS atau setara dengan Rp 3,2 triliun (Andrianto 2021). Namun proses peningkatan nilai komoditas nikel melalui kebijakan hilirisasi dihadapkan pada tantangan yang besar, terutama dengan kebutuhan atas fasilitas pemurnian berupa *smelter* yang harus siap dihadirkan di Indonesia termasuk juga pabrik yang akan mengolah hasil tersebut menjadi barang jadi.

Kebijakan hilirisasi yang meliputi pelarangan ekspor nikel mentah

mengharuskan Indonesia, khususnya industri pertambangan nikel untuk mampu setidaknya melakukan pengolahan bijih nikel. Pembangunan *smelter* nikel yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu setidaknya memerlukan nilai investasi senilai 100 juta Dolar AS (IDN Financials 2020). Hal ini belum termasuk kebutuhan untuk memenuhi pasokan listrik yang dibutuhkan *smelter* untuk dapat melakukan pengolahan dan pembangunan pabrik yang akan mengolah hasil pemurnian oleh *smelter* nikel, sedangkan dengan jumlah sumber daya nikel yang melimpah dan banyaknya industri pertambangan yang aktif melakukan produksi pertambangan nikel diperlukan jumlah *smelter* nikel yang tidak sedikit untuk dapat mencakup seluruh hasil produksi industri pertambangan. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan bahwa pembangunan 30 *smelter* nikel menoreh capaian investasi sebesar 8 miliar Dolar AS, sedangkan Indonesia masih terus gencar melakukan pembangunan *smelter* nikel dengan target 53 *smelter* yang dapat beroperasi di tahun 2023 (Pribadi 2021).

Keinginan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai komoditas nikel dilakukan dengan mengembangkan industri nikel melalui hilirisasi industri. Hilirisasi industri nikel ini mengharuskan Indonesia untuk dapat mengolah nikel mentah produk turunan nikel selanjutnya, baik produk setengah jadi maupun produk jadi. Keinginan ini membutuhkan pembangunan sejumlah pabrik yang dapat memenuhi kebutuhan proses industri untuk dapat mengolah hasil turunan nikel.

Tujuan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi komersial terhadap Korea Selatan untuk investasi baterai EV adalah untuk menciptakan industri EV terintegrasi di tanah air. Industri EV terintegrasi adalah satu rangkaian urutan produksi EV dimulai dari penambangan nikel, *smelter*, pabrik prekursor, pabrik katode, baterai EV, *battery pack*, EV, dan daur ulang baterai akan dilakukan di Indonesia (Viska 2022). Industri baterai EV sendiri akan menjadi penunjang kebutuhan utama dalam proses pembuatan EV sebagai bahan bakar serta alat penggerak EV. Pemerintah Indonesia diuntungkan dalam proses pengembangan industri EV terintegrasi di tanah air, hal ini disebabkan kepemilikan sumber daya nikel yang melimpah dimiliki oleh Indonesia sebagai salah satu bahan baku utama dalam pembuatan baterai EV.

## **Usaha Diplomasi Komersial Indonesia**

Melalui pembentuk dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap aktivitas-aktivitas pendukung yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Korea Selatan dalam upaya untuk mendapatkan investasi proyek baterai EV di Indonesia.

Aktivitas diplomasi komersial Indonesia dalam konteks *network activities* tercermin dalam kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti usaha pihak IIPC Seoul dalam mencari calon investor yang potensial, dan kehadiran Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri ke Busan, Korea Selatan pada tahun 2019.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Investasi/BKPM, IIPC Seoul memiliki tugas untuk dapat mempermudah alur penanaman modal dari Korea Selatan ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas IIPC untuk meningkatkan investasi dari negara tempat kedudukan IIPC ke Indonesia dan memfasilitasi alur investasi dari Indonesia ke negara tempat kedudukan yang didukung dengan beberapa fungsi IIPC; (1) Aktif dalam memberikan kampanye pemasaran investasi dan memberikan informasi investasi; (2) Melakukan koordinasi mengenai program pemasaran investasi dengan perwakilan Indonesia dan institusi terkait di wilayah kerja IIPC, serta instansi pemerintah dan bisnis di Indonesia; (3) Memfasilitasi proses investasi yang terjalin dari Indonesia ke wilayah kerja IIPC ataupun sebaliknya; (4) Memberikan fasilitas penyelesaian masalah investasi perihal realisasi investasi untuk investor dan calon investor dari negara wilayah kerja IIPC yang telah menerima lisensi dari BKPM; (5) Memantau kepentingan serta kebijakan investasi di negara wilayah kerja IIPC; (6) Memfasilitasi investor asal Indonesia yang akan berinvestasi di negara wilayah kerja IIPC; (7) Mengusulkan kebutuhan anggaran dan program kerja untuk pelaksanaan tugas serta pencapaian investasi yang ditetapkan oleh BKPM; (8) Melakukan tugas lainnya yang diberikan langsung oleh BKPM dan kepala perwakilan Republik Indonesia di wilayah kerja IIPC (BKPM 2016).

Dalam usaha untuk mendapatkan investasi proyek baterai EV, IIPC Seoul aktif dalam melakukan pendekatan ke beberapa perusahaan asal Korea Selatan yang potensial untuk dapat menjadi investor dalam proyek baterai EV di Indonesia. Usaha IIPC Seoul dalam melakukan riset serta pendekatan kepada perusahaan produsen baterai EV di Korea Selatan merupakan aktivitas diplomasi komersial dalam konteks *network activities*, karena pada tahapan ini pemerintah Indonesia melalui IIPC Seoul mengembangkan hubungan bisnis antara pihak Indonesia dan juga Korea Selatan khususnya kepada perusahaan yang potensial seperti SK Innovation, Samsung SDI, dan LG Chemical.

Selanjutnya, dalam kunjungannya ke Busan, Korea Selatan pada tahun 2019. Presiden Joko Widodo menghadiri beberapa acara sebagai salah satu aktivitas diplomasi komersial dalam konteks *network intelligence*. Sebagai acara utama, Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN-Korea Selatan. Setelah menghadiri rangkain acara KTT ASEAN-Korea Selatan, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan adanya realisasi penanaman modal oleh pemerintah Korea Selatan ke Indonesia dan juga perkembangan Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan beberapa diskusi dan negosiasi terkait membangun bisnis dan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan beberapa CEO Perusahaan asal Korea Selatan dan kelompok ilmuwan dan peneliti muda Indonesia di Korea Selatan (Presiden RI 2019). Setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan, Presiden Joko Widodo mengunjungi pabrik Hyundai Motor Company (HMC) yang terletak di Ulsan, Korea Selatan pada 26 November 2019. Kunjungan tersebut ditemani dengan beberapa pejabat pemerintahan Indonesia dengan tujuan untuk penandatanganan Nota Kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan HMC. Kunjungan Presiden Joko Widodo ini termasuk dalam aktivitas diplomasi komersial dalam konteks *network activities* karena hal ini merupakan salah satu kunjungan negara dan juga aktivitas dalam membangun hubungan bisnis serta

*Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea  
in Efforts to Realize EV Battery Project Investment*

pengembangan industri baterai EV di Indonesia sebagai tindak lanjut atas usaha yang telah dilakukan IIPC Seoul sebelumnya.

Aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui IIPC Seoul sebagai perpanjangan tangan Kementerian Investasi/BKPM sebagai fasilitator sekaligus *clearing agent* yang memudahkan jalur penanaman modal yang masuk dari negara tempat kedudukan ke Indonesia termasuk aktivitas diplomasi komersial Indonesia dalam konteks *intelligence*. IIPC Seoul dalam usaha untuk mendapatkan investasi melakukan *market research*, menghimpun data-data terkait bisnis yang potensial, menjadi penghubung antara *home* dan *host country*, serta melaporkan seluruh perkembangan mengenai usaha diplomasi komersial yang dilakukan terkait dengan pembangunan baterai EV di Indonesia.

Kegiatan *market research* yang dilakukan oleh IIPC Seoul adalah dengan menghimpun data-data terkait adanya potensi bisnis EV sebagai bisnis yang potensial. Dengan kondisi melimpahnya nikel sebagai bahan baku utama dalam proses produksi baterai EV, dan juga adanya identifikasi perkembangan ekosistem EV di Korea Selatan yang berkembang dan melakukan ekspansi di beberapa negara, akhirnya pihak IIPC Seoul melakukan pendekatan kepada beberapa perusahaan yang potensial setelah melakukan riset sebelumnya. Setelah mendapatkan informasi bahwa LG Chemical memiliki kertarikan untuk melakukan penanaman modal, IIPC Seoul melaporkan hal ini ke TPT Asia Timur Kedeputian Promosi Penanaman Modal melalui Nota Dinas No. 16/ND/IIPC-SEOUL/2019. IIPC Seoul juga menjadi penghubung antara pihak pemerintahan Indonesia dan juga Korea Selatan dalam urusan penanaman modal, hal ini ditekankan melalui wawancara yang dilakukan bersama dengan Leidy Surianingrat, bahwa IIPC Seoul menjadi fasilitator sekaligus promotor dan *clearing agent* dalam urusan penanaman modal dari negara tempat kedudukan ke Indonesia.

Diplomasi komersial yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Korea Selatan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui IIPC Seoul dengan melakukan pendekatan secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang potensial dengan melakukan beberapa riset mendukung sebelumnya. Riset yang dilakukan IIPC Seoul dilakukan untuk

mendapatkan calon investor yang potensial untuk investasi proyek baterai EV di Indonesia, beberapa perusahaan tersebut meliputi SK Innovation, Samsung SDI, dan LG Chemical. Dalam konteks *image campaigns*, brosur mengenai promosi investasi dan keuntungan investasi dalam proyek industri EV di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu usaha diplomasi komersial yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks *image campaigns*. Brosur ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pihak IIPC dalam melakukan promosi investasi dengan menggunakan brosur yang memuat informasi yang memberikan pemahaman atas keuntungan apa yang didapatkan oleh calon investor apabila melakukan penanaman modal di Indonesia.

Brosur promosi investasi dibuat guna mempromosikan investasi khusus dalam bidang industri EV. Brosur tersebut berisikan informasi terkait peluang pasar Indonesia terkait EV yang diprediksikan akan mengalami peningkatan secara berkala, industri yang kompetitif dengan banyaknya masyarakat dengan umur yang legal untuk mengemudi, lokasi strategis untuk membangun industri, latar belakang Indonesia dalam industri EV, dan adanya pemberian intensif serta kebijakan bebas pajak yang diberikan kepada investor. Brosur ini memudahkan pihak IIPC terutama pihak IIPC Seoul dalam melakukan aktivitas diplomasi komersial untuk mendapatkan investasi proyek baterai EV dengan melakukan promosi investasi melalui konteks *image campaigns*. Brosur promosi investasi yang dikeluarkan oleh pihak IIPC ini memuat unsur-unsur yang memudahkan pihak IIPC dalam melakukan promosi investasi sebagai aktor diplomasi komersial Indonesia.

*Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea  
in Efforts to Realize EV Battery Project Investment*

**Gambar 2**  
Brosur EV IIPC



*Sumber: BKPM 2020*

Poin pertama dalam brosur EV menjelaskan mengenai peluang pasar EV di Indonesia. Melalui brosur tersebut dijelaskan bahwa terdapat peningkatan dalam bidang penjualan EV yang didukung dengan populasi masyarakat Indonesia yang telah berkembang dan lebih peduli terhadap lingkungan, walaupun penjualan EV di Indonesia sendiri masih tergolong cukup rendah dan masih didominasi oleh penjualan kendaraan *hybrid*. Selanjutnya dalam poin pertama juga dijelaskan bahwa sejak tahun 2008, produk otomotif Indonesia baik berbentuk *Compeletely Built Up (CBU)*<sup>5</sup> dan *Completely Knocked Down (CKD)*<sup>6</sup> telah diekspor ke lebih dari 80 negara dan menunjukkan perkembangan penjualan yang signifikan.

Selanjutnya, pada poin kedua dalam brosur menjelaskan mengenai adanya fakta menarik bahwa Indonesia merupakan salah satu

<sup>5</sup> CBU merujuk kepada kendaraan yang diekspor atau diimpor dalam keadaan utuh dan telah dirakit secara lengkap dan siap pakai.

<sup>6</sup> CKD merujuk kepada kendaraan yang diekspor atau diimpor dalam keadaan komponen lengkap namun belum dirakit, sehingga diperlukan proses perakitan di negara tujuan.



dari 10 destinasi menarik bagi perusahaan-perusahaan otomotif di dunia untuk melakukan operasi manufaktur di Asia. Hal ini didukung dengan tenaga kerja yang kompetitif di Indonesia dengan skor biaya rata-rata tenaga kerja di Indonesia mencapai 94,6 dari 100 dengan 1,5 juta pekerja otomotif yang andal dan menjanjikan produktivitas yang tinggi dengan biaya yang lebih terjangkau. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa Indonesia memiliki populasi usia mengemudi yang tinggi sebagai poin pendukung adanya industri yang kompetitif untuk otomotif di Indonesia.

Untuk lebih menarik perhatian calon investor yang potensial, melalui brosur juga diberikan penjelasan bahwa persebaran industri otomotif di Indonesia terpusat di pulau Jawa dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi untuk kendaraan dan infrastruktur yang telah berkembang. Selain menjelaskan lokasi industri, dalam brosur juga dijelaskan keuntungan investor apabila berinvestasi di Indonesia. Keuntungan yang akan didapatkan calon investor untuk EV adalah dengan adanya kebijakan percepatan KBLBB Nasional yang mempermudah perkembangan industri EV di Indonesia, selain itu terdapat kebijakan mengenai pajak yang akan menguntungkan calon investor.

### **Hasil Diplomasi Komersial Indonesia**

Hasil dari usaha pemerintah Indonesia dalam mendapatkan investasi baterai EV melalui aktivitas diplomasi komersial adalah dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara pihak Indonesia dan konsorsium Korea Selatan untuk melakukan penanaman modal dalam industri baterai EV secara terintegrasi dari hulu ke hilir dengan total investasi sebesar 9,8 Miliar Dolar AS atau setara dengan Rp 142 Triliun. Nota Kesepahaman ini menjadi bukti bahwa usaha pemerintah Indonesia melalui diplomasi komersial berhasil mencapai tujuan dan keinginan awal untuk dapat menciptakan industri baterai EV terintegrasi dan juga meningkatkan nilai komoditas nikel Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian penanaman modal untuk mengembangkan industri baterai EV terintegrasi di Indonesia, dilanjutkan dengan perjanjian Nota Kesepahaman selanjutnya

*Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea  
in Efforts to Realize EV Battery Project Investment*

untuk membangun pabrik baterai EV di Indonesia yang terjalin antara IBC dan juga konsorsium Korea Selatan yaitu LG Energy Solution dan Hyundai dengan total investasi sebesar 1,1 Miliar Dolar AS. Melalui Nota Kesepahaman ini, dibentuk PT HKML Battery Indonesia sebagai perusahaan gabungan yang dibentuk atas dasar perjanjian melalui Nota Kesepahaman tersebut. Pembangunan pabrik dan pembentukan PT HKML Battery Indonesia ini menjadi salah satu awal mula dari realisasi perjanjian penanaman modal sebesar 9,8 Miliar Dolar AS yang telah disepakati sebelumnya dengan mengembangkan industri baterai EV terintegrasi di Indonesia.

Melalui perjanjian investasi atau penanaman modal yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan ini, pemerintah Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan seperti dapat memanfaatkan sumber daya alam nikel secara maksimal dan meningkatkan nilai komoditas nikel yang sebelumnya terpaku kepada ekspor bahan mentah, menyerap banyak tenaga kerja disebabkan adanya industri baterai EV yang terintegrasi, memberdayakan bisnis pertambangan nasional, menjadi produsen dalam industri EV, dan meningkatkan hubungan ekonomi politik dengan Korea Selatan. Sedangkan dari pihak perusahaan Korea Selatan, perusahaan berupa konsorsium yang terbentuk antara LG Energy Solution dan Hyundai dapat melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia dengan membangun pabrik mereka di Indonesia, dapat menjangkau sumber daya lebih dekat yaitu nikel sebagai bahan baku utama produksi baterai EV, dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas terutama pasar Indonesia dan Asia Tenggara.

### **Simpulan**

Pemerintah Indonesia melakukan promosi investasi sebagai salah satu aktivitas diplomasi komersial serta melakukan kerja sama antar instrumen pemerintahan untuk menciptakan kolaborasi harmonis dalam usaha mendapatkan investasi proyek baterai EV. IIPC Seoul yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari BKPM bertugas sebagai aktor utama diplomasi komersial dengan melakukan riset serta pendekatan kepada pihak-pihak yang potensial. Melalui hal ini instrumen pemerintah lainnya

seperti Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Kementerian ESDM memberikan dukungan seiring dengan perkembangan yang dilakukan oleh pihak IIPC Seoul kepada pihak investor. Seluruh aktivitas diplomasi komersial ini didorong oleh adanya tujuan yang jelas yaitu untuk dapat meningkatkan nilai komoditas nikel yang didukung oleh adanya sumber daya alam nikel yang melimpah di Indonesia sehingga menghasilkan tanda tangan nota kesepahaman untuk membangun industri hilirisasi nikel di Indonesia khususnya untuk baterai EV.

### **Tentang Penulis**

**Aulia Nadhif** adalah Sarjana Hubungan Internasional. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Universitas Padjadjaran pada tahun 2023. Penulis dapat dihubungi melalui email di [aulia18015@mail.unpad.ac.id](mailto:aulia18015@mail.unpad.ac.id).

**Dadan Suryadipura** adalah staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Universitas Padjadjaran pada tahun 1998; Pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Padjadjaran pada tahun 2015; dan saat ini sedang melanjutkan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran. Penulis dapat dihubungi melalui email di [suryadipura@unpad.ac.id](mailto:suryadipura@unpad.ac.id).

### **Referensi**

#### **Buku dan Bab dalam Buku**

Okano-Heijmans, Maaike, 2011. "Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies", dalam Bergeijk, Peter A.G. et al. (eds)., 2011. *Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives* (hlm. 7-36). Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

## **Artikel Jurnal**

- Aleidan, Megbel, 2019. "Commercial diplomacy as a part of national transformation and its impact on the internationalization of SMEs: evidence from Saudi Arabia", *Asian Economic and Financial Review*, **9** (9): 1019-1031.
- Bellina, Željko, 2014. "Commercial diplomacy as an instrument for enhancing economic recovery: the case of Serbia", *International Journal of Diplomacy and Economy*, **2** (3): 202-224.
- Bellina, Željko, 2019. "Commercial Diplomacy in The Service Helping to Attract Foreign Direct Investment: The Case of The Republic of Serbia", *Teorija In Praksa*, **56** (1): 53-73.
- Charlton, Andrew, dan Nicholas Davis, 2007. "Does investment promotion work?", *The BE Journal of Economic Analysis & Policy*, **7** (1): 1-19.
- Inayah, Astiwi, et al., 2022. "Commercial Diplomacy to Increase Exports of Lampung Cocoa Commodities in the European Union Market", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, **628**: 65-73.
- Lim, Sung-Hoon, 2008. "How investment promotion affects attracting foreign direct investment: Analytical argument and empirical analyses", *International Business Review* **17** (1): 39-53.
- Udovic, B. 2011. "Slovene commercial diplomacy in the Western Balkan countries", *Communist and Post-Communist Studies* **44** (4): 357-368.
- Wulandari, Alvira Rizki, dan Dadan Suryadipura, 2021. "Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)", *Padjadjaran Journal of International Relations*, **3** (2): 103-125.

## **Dokumen Resmi**

BKPM, 2016. *Salinan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Luar Negeri*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Kementerian ESDM, 2020. *Peluang Investasi Nikel Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM.

Kementerian Perindustrian, 2015. *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional*. Jakarta: Pusat Komunikasi Publik.

## **Artikel Daring**

Andrianto, Robertus, 2021. “Goks! Harta Ribuan Triliun Jadi ‘Obat’ Anti Utang”, *CNBC Indonesia*, 29 September [daring]. dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210928230322-17-279925/goks-harta-ribuan-triliun-ini-jadi-obat-ri-anti-utang#:~:text=Feronikel%20memiliki%20harga%20jual%20yang,atau%20setara%20Rp%20644.000%2Fwmt> [diakses pada 18 Mei 2023].

Danajaya, Dio, 2022. “Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik, Konsorsium LG Suntik Dana Rp 142 Triliun”, *Kompas*, 9 Juli [daring]. dalam <https://otomotif.kompas.com/read/2022/06/09/141200015/bangun-pabrik-baterai-mobil-listrik-konsorsium-lg-suntik-dana-rp-142> [diakses pada 18 Mei 2023].

Fallin, D., & K. Lee, 2022. “Southeast Asia Hopes to Become the Next EV Hub” [daring]. dalam <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/southeast-asia-hopes-become-next-ev-hub> [diakses pada 18 Mei 2023].

IDN Financials, 2020. “PURE perkirakan kebutuhan investasi untuk smelter Nikel US\$ 100 juta”, *IDN Financials*, 23 November, [daring]. dalam <https://www.idnfinancials.com/id/news/37155/pure-estimates-investment-build-nickel-smelter> [diakses pada 18 Mei 2023].

*Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea  
in Efforts to Realize EV Battery Project Investment*

- Idris, Muhammad, 2019. "Indonesia Raja Nikel Dunia, Puluhan Tahun Hanya Ekspor Bijih Mentah", *Kompas*, 15 Desember, [daring]. dalam <https://money.kompas.com/read/2019/12/15/123615726/indonesia-raja-nikel-dunia-puluhan-tahun-hanya-ekspor-bijih-mentah?page=all> [diakses pada 18 Mei 2023].
- Media Indoneisa, 2021. "Mobil Listrik Bakal Banyak Dilirik di Kawasan Asia Tenggara", *Media Indonesia*, 4 Februari, [daring]. dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/382514/mobil-listrik-bakal-banyak-dilirik-di-kawasan-asia-tenggara> [diakses pada 18 Mei 2023].
- Presiden RI, 2019. "Presiden Jokowi Bertolak ke Korea Selatan Hadiri Rangkaian Acara KTT ASEAN-RoK", [daring]. dalam <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-bertolak-ke-korea-selatan-hadiri-rangkaian-acara-ktt-asean-rok/> [diakses pada 18 Mei 2023].
- Pribadi, A., 2021. "Peningkatan Nilai Tambah Mineral Ditargetkan Gaet Investasi Hingga USD 21.28 Miliar", [daring]. dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/peningkatan-nilai-tambah-mineral-ditargetkan-gaet-investasi-hingga-usd-2128-miliar> [diakses pada 18 Mei 2023].
- Viska, 2022. "Pembangunan Industri Baterai Listrik Terintegrasi Dimulai", [daring]. dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/42399/pembangunan-industri-baterai-listrik-terintegrasi-dimulai/o/berita> [diakses pada 18 Mei 2023].

### **Lain-lain**

- Mordor Intelligence, 2022. "ASEAN Electric Vehicle Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, And Forecast (2022-2027)" [daring]. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asean-electric-vehicle-market> [diakses pada 18 Mei 2023].

- Nickel Institute, 2022. "The life of Ni", *Nickel Institute* [daring]. dalam <https://nickelinstitute.org/media/1190/thelifeofni.pdf> [diakses pada 18 Mei 2023].
- Pribadi, A., 2020. Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi. *Siaran Pers Nomor: 301.Pers/04/SJI/2020*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Surianingrat, L., 2022. "Usaha Promosi Investasi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Upaya Proyek Baterai EV di Indonesia", diwawancarai oleh A. Nadhif, pada 25 Oktober 2022.

*Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea  
in Efforts to Realize EV Battery Project Investment*